



KR-Franz Boedisukamanto

**MUDIK WARMINDO 2023: Para pengusaha Warung Makan Indomie (Warmindo) berjalan meninggalkan bus yang membawanya dari perantauan yang berakhir di Lapangan Parkir Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Senin (17/4/2023). Mereka memanfaatkan fasilitas mudik secara gratis untuk merayakan Idul Fitri 1444 H di kampung halaman.**

**Investasi**

"Bapak Presiden juga menjanjikan kemudahan investasi di Indonesia," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan pengarahannya pers secara daring, Senin (17/4), mengenai kunjungan Presiden ke Hannover, Jerman. Dalam pembukaan Hannover Messe yang dihadiri Kanselir Jerman, Minggu

(16/4) malam waktu setempat, Presiden Jokowi antara lain mengatakan, Indonesia sedang melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan teknologi. "Ini sejalan dengan tema yang diangkat, yaitu 'Making Indonesia 4.0,'" kata Menlu Retno. Guna mencapai transformasi tersebut, Indonesia menjalankan dua

strategi besar, yaitu hilirisasi industri dan ekonomi hijau.

Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz menekankan pentingnya hubungan ekonomi setara antara Indonesia-Jerman dan Indonesia-Uni Eropa (UE).

(Ant/San)-d

Sambungan hal 1

**Libur**

Suwondo mengatakan, pihaknya juga menggenjot operasi preman dan penyakit masyarakat sejak 5 April 2023 lalu. Untuk mendukung Idul Fitri didirikan 20 lokasi Pos Pengamanan (Pospam), 5 Pos Pemantauan (Pos Pantau) dan 5 Pos Pelayanan (Posyan). Di Kabupaten Sleman ada 2 Pospam di Tempel dan Gamping, 3 Posyan di Plaza Ambarukmo, Kaliurang dan Prambanan. Kota Yogyakarta ada 5 Pospam, Simpang Empat Tugu Pal Putih, Simpang Empat Nol Kilometer, Teteg Malioboro, Gejayan dan Kebun Binatang Gembira Loka. Di Gunungkidul ada 5 Pospam di Siyono, Hargodumilah, Baron, Rest Area JLS Girisubo dan JLS Simpang Tiga Truwono serta 2 Posyan di Semin dan Terminal Dhaksinara.

Di Bantul ada 5 Pospam Sedayu, Parangtritis, Piyungan, Druwo dan Srandakan. Sementara di Kulonprogo ada 3 Pospam Temon, Terminal Wates dan Nanggulan, 4 Pos Pantau di Sungai Mudal, Pantai Ngeplong, Pantai Ngelo dan Pantai Brosot.

"Tahun ini kami menurunkan 1.592 personel Polda dan jajarannya untuk pengamanan. Jumlah ini belum ditambah 1.803 personel dari instansi terkait seperti Dishub, Pol PP dan lainnya. Ada 854 masjid yang kita kawal, 9 terminal, 2 bandara, 6 stasiun kereta api, 176 pasar dan 148 objek wisata. Kami ingin zero kecelakaan. Prioritasnya masyarakat yang melintas, menuju dan meninggalkan DIY dipastikan aman dan nyaman," tandas Suwondo.

Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menjelaskan, Satpol PP membagi dua patroli jelang Subuh dan malam hari. Selain masalah keamanan, pengawasan juga difokuskan di 51 titik objek wisata pantai, waduk dan gunung. Satpol PP DIY mengerahkan 328 personel Satlinmas Rescue Istimewa untuk mengamankan kawasan Pantai Selatan sepanjang libur Idul Fitri. Satu destinasi yang mendapat perhatian khusus adalah Pantai Parangtritis, Bantul. Sebab terdapat sejumlah palung laut yang kerap membuat wisatawan terseret ombak hingga tenggelam.

"Palung laut menimbulkan rip current. Untuk itu wisatawan kamiimbau berhati-hati saat bermain air, terlebih jika berada di lokasi yang berombak tenang. Padahal arus air di bawahnya sangat kencang sehingga sangat membahayakan jika tak waspada. Di situ banyak orang yang tidak tahu, jadi ketika dilihat air tenang itu dianggap sebagai daerah yang aman tapi air tenang itu ada arus bawah lautnya yang kencang. Wisatawan bisa terseret di situ," paparnya.

Terpisah, Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurizal mengatakan, peningkatan arus mudik Lebaran diprediksi mulai terjadi Selasa (18/4) hari ini hingga Kamis (18/4). Tiga wilayah perbatasan yakni Prambanan, Tempel dan Temon, menjadi atensi karena merupakan pintu utama masuk wilayah DIY. Rekamaya arus lalu lintas akan dilakukan di tiga titik tersebut jika terjadi kemacetan. Seperti di Perbatasan Prambanan, polisi akan memberlakukan kontra flow jika terjadi penumpukan kendaraan dampak penggunaan tol fungsional Klaten.

(Ria/Ayu/Ati)-d

Sambungan hal 1

**Merukyat**

Di zaman Nabi, sudah ada kalender urfi yang tetap. Bulan selang-seling 30-29. Syaiban normalnya 29 hari, sampai turun perintah Nabi untuk rukyatul hilal. Walhasil, Syaiban jadi sering istikmal (30 hari). Akibatnya Ramadannya sering 29 hari. Dari 9 kali Ramadan di masa Nabi, 7 kali 29 hari.

Perintah rukyatul hilal itu sekaligus indikasi, bahwa bulan lainnya tidak dirukyat. Namun pada perkembangannya, kebutuhan perencanaan, mendorong umat Islam mempelajari astronomi. Muncullah kalender hisab dengan ragam kriteria, yang dapat memunculkan perbedaan hari.

Ilmu hisab tahu bahwa rata-rata sebulan terdiri dari 29,53 hari. Maka perlu 11 tahun kabisat dalam periode 30 tahun. Tambahan hari perbulan adalah 0,03 hari untuk mencapai durasi bulan yang tepat 29,53 hari. Bukan angka bulat. Padahal hari itu harus bulat. Dalam Islam, hari dimulai dari Magrib ke Magrib.

Hisab imkan rukyat yang tersederhana adalah Ijtimak Qobla Ghurub. Jika ijtimak terjadi sebelum Magrib, maka diasumsikan hilal sudah muncul. Kriteria ini pernah digunakan Persis tahun 1990-an. Belakangan muncul Hisab Wujudul Hilal, lalu Imkanur Rukyat 238,

lalu 364. Semuanya Hisab. Persoalannya, prediksi hilal tidak sama dengan gerhana. Sekalipun Astronomi menunjukkan hilal sudah jaiz terlihat, keterlihatannya masih tergantung baiknya pengamatan dan cuaca. Syarat ABC.

Ijtimak bulan Syawal kali ini jatuh pada Kamis (20/4) pukul 11:13 WIB. Karena sudah 29 Ramadan, Kamis sore itulah rukyatul hilal dilakukan. Adakaita pengamatan dipersiapkan baik dan cuaca mendukung, keterlihatan hilal tinggal tergantung faktor A. Jadi hisab ini hanya akan menentukan tempat mana hilal jaiz dan mana mustahil terlihat. Tidak menentukan mana hilal wajib terlihat, karena masih ada faktor B dan C.

Persoalannya, wilayah jaiz inipun ikhtilaf kriterianya. Dulu Indonesia pakai kriteria 238 (2 derajat tinggi, 3 derajat elongasi, 8 jam umur bulan). Sebenarnya kriteria ini kurang ilmiah, karena mengandalkan klaim kesaksian masa lalu, ketika ada hilal syari (disahkan hakim) saat tingginya baru 2 derajat. Sekarang yang diadopsi 364 (3 derajat tinggi dan 6,4 derajat elongasi). Kriteria ini lebih ilmiah, karena mempertimbangkan kontras cahaya bulan yang lemah.

Karena kali ini masih di bawah 3 derajat, maka klaim keterlihatan hilal kemungkinan akan ditolak, dan sidang itsbat akan memutuskan Lebaran Sabtu. Sedang Muhammadiyah dari awal hanya memakai hisab wujudul hilal, jadi sudah memutuskan Lebaran Jumat.

Itsbat lokal (matla) ini secara fiqh sesuai madzhab Syafii. Dulu berabad-abad, karena telekomunikasi, semua rukyat praktis lokal. Walaupun tiga madzhab besar yang lain tidak membatasi matla, namun cakupannya baru menjangkau satu wilayah kekuasaan hukum, belum seluruh dunia. Untuk seluruh dunia masih ada persoalan 24 zona waktu, yang di ujungnya tetap akan berbeda hari, sekalipun melihat matahari di sore yang sama.

Namun untuk setengah dunia di Timur Atlantik, ketika hisab lokal Indonesia masih di wilayah mustahil, sedang di Timur Tengah di wilayah jaiz, akan ada kemungkinan penganut rukyat yang mengikuti hasil rukyat Timur Tengah. Walhasil yang berlebaran Jumat akan lebih banyak dari sekadar pengikut Muhammadiyah.

(Penulis adalah pengamat kebumihan dan keantariksaan, Anggota Ikatan Alumni Program Habibie, IABIE)-d

**MAKSIMALKAN ALAT BUKTI  
Penahanan Lukas Enembe Diperpanjang**

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga 12 Mei 2023. Perpanjangan masa penahanan terhadap Lukas Enembe dilakukan berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Telah dilakukan perpanjangan masa penahanan untuk tersangka LE selama 30 hari ke depan, sampai dengan 12 Mei 2023 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (17/4).

Perpanjangan masa penahanan tersebut di-

lakukan demi kepentingan penyidikan salah satunya adalah memaksimalkan kelengkapan alat bukti untuk persidangan. "KPK tetap berkomitmen memaksimalkan pemenuhan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka dimaksud sehingga bisa segera di bawa ke persidangan dan di uji di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor," ujar Ali.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan dua tersangka dalam rangkaian kasus Lukas Enembe, yakni Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka sebagai penyuaap LE. KPK telah membekukan rekening berisi uang sekitar Rp 81,8 miliar dan 31.559 dolar Singapura yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk tersangka Lukas Enembe. (Ful)-d

**KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL**

**Bareskrim Tetapkan Dito Mehendra Tersangka**

**JAKARTA (KR)** - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Penetapan Dito Mahendra sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik bersama perwakilan Itwasum, Divisi Hukum, Propam, dan Wasidik Polri.

Hal tersebut disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Senin (17/4). "Peserta gelar perkara sepakat menaikkan status Dito Mahendra dari saksi menjadi tersangka," katanya.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto telah memerintahkan penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap Dito Mahendra setelah yang bersangkutan dua kali mangkir dari pemanggilan sebagai saksi, yakni pada Senin

(3/4) dan Kamis (6/4). Penyidik saat ini sedang mencari keberadaan Dito Mahendra yang diduga bersembunyi. Penyidik juga disertai surat perintah untuk membawa tersangka Dito.

Selain itu, penyidik juga mempertimbangkan untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) apabila Dito Mahendra tidak kunjung memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. "Ya kami akan panggil tersangka dan kalau tidak kunjung datang kami (terbitkan) DPO," kata Djuhandhani.

Dito Mahendra terseret kasus kepemilikan senjata api ilegal usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 15 pucuk senjata api ketika menggeledah kediamannya pada Senin (13/3). Belasan senjata api berbagai jenis itu kemudian diserahkan ke Polri untuk diselidiki. Hasil penyelidikan Polri, dari 15 pucuk senjata api, sebanyak sembilan pucuk dinyatakan tidak berizin atau tidak punya dokumen resmi alias ilegal. (Ant/Has)-d

**KPK**

EMA Sumarna mengaku dirinya tidak mengetahui secara pasti jenis dan jumlah dokumen yang dibawa KPK dalam penggeledahan kemarin. Namun demikian, ia tidak menampik ada dokumen kertas dan hard drive dari ruang ATCS. "Sepertinya ada, tapi saya enggak tahu pasti," tuturnya.

EMA Sumarna mengaku saat dilakukan penggeledahan, KPK memasang segel di ruangan-ruangan yang diperiksa. Namun kemudian dibuka dan bisa dipergunakan seperti sebelumnya. Sejumlah penyidik KPK menggeledah berbagai ruangan di Balaikota Bandung, Senin siang. Penyidik KPK datang sekitar pukul

12.00 WIB terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Walikota Bandung (nonaktif) Yana Mulyana. Para penyidik KPK turun dari mobil minibus berwarna hitam dan langsung menuju ruang tengah Balaikota Bandung. Dari ruangan itu, para penyidik kemudian terlihat menyebar ke dua ruangan, yakni Ruang Walikota Bandung, Ruang Wakil Walikota Bandung, dan Ruang ATCS Bandung.

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet untuk Proyek Bandung Smart City Tahun Anggaran 2022-2023. (Ant/San)-d

**Tim Penyidik**

Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati DIY Muhammad Anshar Wahyuddin SH MH mengungkapkan, cek lokasi itu dilakukan Tim Penyidik Kejati DIY bersama 7 instansi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) Sleman, PDAM Tirta Sembada, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Sleman, Inspektoral, PLN, BPN dan Kalurahan Caturtunggul. Mereka, kemarin mendatangi lokasi Ambarukmo Green Hills.

"Instansi itu kami ajak untuk mengecek sesuai dengan tupoksinya. Misalnya BPN mengukur luasan lahan, PLN dan PDAM mengecek status listrik atau air PDAM yang dipasang dan lainnya, ungkap Aspidus.

Di samping itu, cek lokasi oleh tim penyidik ini, dimaksudkan untuk menghitungkan kerugian negara dalam perkara dugaan kasus mafia tanah kas desa. Selain ada uang sewa juga ada komponen lainnya. "Ini bagian untuk menghitungkan kerugian negara. Kami akan cek apa saja komponen-komponennya," terang Anshar.

Sebagaimana diketahui, Kejati DIY telah menetapkan Direktur PT Deztama Putri Sentosa, RS (33) selaku penyewa tanah kas desa (TKD) Caturtunggul sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. PT Deztama Putri Sentosa diduga secara melawan hukum tanpa izin pemanfaatan lahan dari Gubernur DIY dengan membangun pemukiman dan menyewakan tanah kas desa kepada pihak ketiga.

Selain tanpa izin, PT Deztama Putri Sentosa tidak membayar uang sewa, membangun tanpa Dilengkapi Dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Ganguan (HO) dan Izin Pengngeringan Lahan dikarenakan merupakan tanah pertanian. Tak hanya itu, penyewa juga tidak melakukan pembayaran terhadap pensertifikatan tanah kas desa yang seharusnya dari pembayaran tersebut menjadi pendapatan negara. (Sni)-d



**Prakiraan Cuaca Selasa, 18 April 2023**

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	23-31	65-95
Sleman	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	23-30	65-95
Wates	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	23-31	65-95
Wonosari	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	23-30	65-95
Yogyakarta	Sunny	Cloudy	Cloudy	Cloudy	23-31	65-95

**Muhammad Zuhdan, SIP MA**  
Kaprodil Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta

**KONTESTASI** politik menuju Pilpres 2024 kian menarik tapi kian membingungkan rakyat. Menariknya yaitu permainan catur para ketua partai dalam membangun koalisi ataupun negosiasi bakal capres dan cawapres dalam koalisi tersebut. Sedangkan membingungkannya yaitu

**Koalisi Besar versus Partai Besar : Menang Siapa?**

soal motif dan tujuan politik para ketua partai politik dalam membangun koalisi ataupun penentuan nama capres-cawapresnya. Hal ini yang sulit ditebak secara kasat mata, walaupun mudah untuk dianalisis dengan kalkulasi politik yang matang.

**Koalisi Besar : Setia Kepada Presiden**

Adanya koalisi besar gabungan dari KIB-KKIR yang tercetus 2 April 2023 yang lalu menciptakan fenomena baru dalam gelagat Pilpres di Indonesia. Koalisi tersebut ditengarai sebagai All The President's Men, yang mana ditengarai juga king maker-nya adalah Jokowi. Artinya semua ketua partai yang berada dalam koalisi besar tersebut adalah orangnya Jokowi dan tunduk dalam perintah Jokowi. Sedangkan partai-partai yang sudah bergabung dalam koalisi besar ini yaitu Golkar,

Gerindra, PKB, PBB, PPP, dan PAN.

Dalam koalisi besar ini memang belum ditentukan siapa yang bakal dicapreskan dan siapa yang bakal dicawapreskan. Tentunya setiap ketua partai ingin jagoanya dicapreskan di dalam koalisi tersebut, tapi nampaknya tawar-menawarnya masih sulit. Untuk menstabilkan koalisi besar ini dan juga menkonsolidasikannya lebih kuat, tentu ada mekanismenya terkait penentuan bakal capres-cawapres nantinya.

Ada mekanisme voting antar ketua partai atau bisa juga lobby-lobby antar ketua partai yang bergabung dalam koalisi besar tersebut. Tapi nampaknya kedua mekanisme tersebut tidak akan dipilih, dan para masing-masing ketua partai besar hanya akan menyerahkan pasangan nama-nama capres-cawapres ke Jokowi, dan penentu akhir dari siapa nama

capres dan cawapres yang akan diusung oleh koalisi besar nanti adalah Jokowi.

**Partai Besar : Setia Kepada Ketua Partai**

Berbeda dengan yang disebut sebagai partai besar, yaitu PDI-P. Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai ini juga belum menyampaikan terkait soal nama bakal capres yang akan diusung oleh PDI-P. Megawati juga menyampaikan secara tegas dalam pidato HUT Ke 50 PDI-P pada 10 Januari lalu bahwa dialah yang akan menentukan siapa capres yang akan dipilih untuk didukung oleh PDI-P. Sisi lain, bersiweran berita ada nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang akan menjadi kandidat kuat yang akan dipilih oleh Megawati untuk diusung oleh PDI-P menjadi capres di pilpres 2024 nanti, atau mungkin nama lain yang diluar prediksi.

Dalam posisinya sebagai ketua

umum partai, Megawati adalah sosok sentral dan sekaligus king maker dalam penentuan capres 2024. Jika partai besar ini dihadapkan dengan koalisi besar, maka ada dua king maker yaitu Megawati dan Jokowi yang akan saling berhadapan. Sedangkan kita ketahui semuanya bahwa relasi antara Megawati dan Jokowi dalam struktur partai PDI-P adalah ketua umum dan petugas partai.

Siapa Yang Akan Menang ?

Pertanyaannya, apakah Jokowi akan tetap dalam posisi king maker dalam penentuan pencapresan di koalisi besarnya? Atau dia sebagai petugas partai, yang dalam pilihan kondisi dan posisi apapun harus tunduk kepada ketua partai? Kedua pertanyaan inilah yang akan bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas, siapa capres-cawapres yang berpotensi menang di pilpres 2024.

Jika Jokowi dalam posisi sebagai king maker dalam kerajaan

**UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

**Creative Economy Park**

koalisi besarnya, tentu dia punya peluang menang lebih besar melawan partai besar ataupun koalisi perubahan. Tetapi jika Jokowi dalam posisi sebagai petugas partai tentu sulit untuk meyakinkan ketua-ketua partai yang tergabung dalam koalisi besar untuk tetap nyaman setia bergabung dibawah kendalanya. Hal ini nampak dari beberapa ketua partai yang tergabung dalam koalisi besar merasa keberatan dan tidak nyaman jika PDI-P meminta posisi capres sebagai syarat politik bergabung dengan koalisi besar. Permintaan PDI-P itu dinilai banyak pihak wajar dan rasional karena sebagai partai yang suaranya terbanyak di pemilu 2019 yang lalu, tetapi mengganggu kestabilan dan kemerdekaan ketua-ketua partai lain yang ingin menjadikan koalisi besar sebagai Jokowi Legacy.